



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce>

2599-1833 (print)

2621-3467 (online)

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kampus Merdeka Berdasar Optimalisasi Kompetensi Kewarganegaraan serta Pelayanan Berkualitas terhadap Mahasiswa

Agil Nanggala

Mahasiswa Program Magister Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154

agilnanggala@upi.edu

Informasi artikel

Sejarah artikel:
Diterima :09 Oktober 2021
Revisi :11 Oktober 2021
Dipublikasikan :10 Desember 2021

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan informasi argumentatif bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mampu berkolaborasi dengan kebijakan kampus merdeka, supaya berdampak positif pada upaya mengelola bonus demografi bangsa, melalui pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam kampus merdeka, yang mengarah pada upaya ilmiah mengoptimalkan kompetensi kewarganegaraan dan memberikan pelayanan berkualitas untuk mahasiswa, guna menjadi langkah strategis dalam mewujudkan masyarakat madani Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, tentu analisis data dalam penelitian ini berfokus terhadap: reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu: 1) pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam kampus merdeka merupakan upaya ilmiah dalam mengoptimalkan kompetensi kewarganegaraan milik mahasiswa, yaitu: *civic knowledge*, *civic skills* serta *civic disposition*, sebagai modal sosial mewujudkan warga negara beradab (*civic virtue*), pada konteks pelayanan berkualitas bagi mahasiswa, tentu berbasis sistem among Ki Hajar Dewantara, karena berfokus pada praktis pendidikan yang membimbing serta melayani, supaya mahasiswa berkembang optimal, 2) pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam kampus merdeka menggunakan model Tyler, karena berfokus terhadap orientasi kurikulum, sehingga penerapan dan evaluasi kurikulumnya bisa dikembalikan pada setiap institusi. Karena substansi pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam kampus merdeka, tidak membatasi inovasi dan karakteristik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap institusi, tetapi menjadi indikator nasional, agar terjadinya harmonisasi penggelolaan bonus demografi.

Kata kunci:

Kampus Merdeka
Kompetensi Kewarganegaraan
Kurikulum PKn
Pelayanan Mahasiswa
Pendidikan Kewarganegaraan

ABSTRACT

Development of Civic Education Curriculum in Independent Campus Based on Optimizing Citizenship Competence and Quality Services for Students. This research was conducted to provide argumentative information that Citizenship Education is able to collaborate with the independent campus policy, so that it has a positive impact on efforts to manage the nation's demographic bonus, through the development of the Citizenship Education Law on an independent campus, which leads to scientific efforts to optimize citizenship competencies and provide quality services for students. , in order to be a strategic step in realizing Indonesian civil society. This research was carried out through a qualitative approach with a literature study method, of course the data analysis in this study focused on: data reduction, data display and drawing conclusions. The results of the study are: 1) Citizenship

Keywords:

keyword 1
keyword 2
keyword 3
keyword 4
keyword 5

Education curriculum development in an independent campus is a scientific effort in optimizing student citizenship competencies, namely: civic knowledge, civic skills and civic disposition, as social capital to realize civilized citizens (civic virtue), in the context of quality services. for students, of course based on the Among Ki Hajar Dewantara system, because it focuses on practical education that guides and serves, so that students develop optimally, 2) Citizenship Education curriculum development in an independent campus uses the Tyler model, because it focuses on curriculum orientation, so that the implementation and evaluation of the curriculum can be returned to each institution. Because the substance of the Citizenship Education curriculum development in an independent campus does not limit the innovation and learning characteristics of Citizenship Education at each institution, but becomes a national indicator, so that there is harmonization of the management of the demographic bonus.

Copyright © 2021 (Agil Nanggala). All Right Reserved

Pendahuluan

Penting untuk merealisasikan pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang berkompeten mengefektifkan penerapan kebijakan kampus merdeka, serta berorientasi mengoptimalkan kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan berkualitas bagi mahasiswa. Kendati secara basis seluruh perguruan tinggi Indonesia memiliki otonomi dalam menyusun kurikulumnya, sebagaimana yang ditegaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, pada pasal 41, tetapi upaya pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam kampus merdeka, penting untuk diwujudkan. Karena tujuan dalam merealisasikan keseragaman secara nasional pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, walau bersifat basis, tetapi minimal mempunyai sinkronisasi atau keselarasan untuk upaya membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, berdaya saing serta unggul, meski pun kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang berdasar pada optimalisasi kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan berkualitas pada mahasiswa, tidak secara umum diterapkan pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia, bukan menjadi problematik, karena merupakan esensi atas kampus merdeka. Karena yang diharapkan, pengembangan kurikulum tersebut, menjadi indikator atau acuan terhadap seluruh perguruan tinggi, dalam upaya menyusun serta merealisasikan kurikulum juga pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang adaptif pada kampus merdeka, karena bersifat modern, komprehensif, berdasar optimalisasi kompetensi kewarganegaraan bahkan pelayanan yang berkualitas untuk mahasiswa.

Krug (dalam Asri, 2017: 194) mengungkapkan kurikulum menjadi strategi dan praktis untuk memperoleh orientasi pendidikan. Kurikulum berperan penting untuk perkembangan dan elaborasi pendidikan dalam suatu bangsa, karena kontennya berfokus terhadap arah, bahan, siasat, evaluasi pada realisasi pembelajarannya. Dalam Konteks tujuan atas pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka, tentu sifatnya utuh, karena tidak sebatas optimalisasi *civic knowledge* saja, tetapi juga *civic disposition* serta *civic skills* yang berfokus pada upaya mewujudkan *civic virtue* pada mahasiswa selaku warga negara. Kaimuddin (2015:19) menjelaskan kurikulum dalam pendidikan tinggi harus komprehensif, karena pembelajarannya perlu mengakomodir perubahan bagi mahasiswa sebagai individu juga bagian integral atas masyarakat, sehingga lingkungan, sarana juga prasarana, dan realisasi pembelajarannya perlu berkualitas.

Modernisasi serta kompleksnya problematik yang eksis pada masyarakat, berdampak terhadap kurikulum pembelajaran yang harus beradaptasi pada realitas tersebut, pengembangan kurikulum adalah solusi alternatif, dalam upaya harmonisasi bahan pembelajaran pada realitas yang nampak. Hidayat, dkk (2019, hlm. 22) mengungkapkan pengembangan kurikulum

berfokus pada praktik perencanaan dan memformulasikan kurikulum, agar terwujudnya esensi juga struktur kurikulum yang komprehensif, guna adaptif pada berbagai situasi dinamis juga kompleks. Termasuk dalam upaya mengembangkan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang berdasar pada optimalisasi kompetensi kewarganegaraan bahkan pelayanan berkualitas terhadap mahasiswa, nyatanya harus mengefektifkan konsep pendekatan pembelajaran yang membahas dimensi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga diketahuinya relevansi ilmiah pentingnya pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang berdasar pada optimalisasi kompetensi kewarganegaraan mahasiswa terhadap dimensi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang komprehensif. Fajri (2019: 28-29) menjelaskan secara umum tersedia 4 tahap dalam mengembangkan kurikulum, seperti: 1) makro yang bersifat nasional, 2) institusi yang bersifat lembaga pendidikan, 3) mata pelajaran juga mata kuliah (disiplin ilmu), serta 4) praktis pembelajaran dalam kelas.

Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan satuan perangkat mengenai tujuan, bahan, siasat, praktis juga evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai modal dalam mencapai orientasi pendidikan nasional. Tentu karakteristik serta orientasi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di setiap perguruan tinggi, mempunyai perbedaan, karena realisasi atas otonomi perguruan tinggi. Tetapi merujuk terhadap konvensi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, selaku mata kuliah bersifat dasar bahkan bersifat umum yang sosialisasikan melalui Dirjen Dikti (2014) mengungkapkan bahwa pembelajaran PKn pada perguruan tinggi, dalam substansi minimalnya, perlu mencerminkan: hakikat PKn, identitas Indonesia, integrasi bangsa, nilai bahkan norma, hak juga kewajiban warga negara, demokrasi yang berdasar Pancasila, hukum juga konstitusi, politik bahkan hak azasi manusia, wawasan nusantara, bahkan ketahanan nasional. Winataputa (dalam Juanda dan Rahayu, 2019: 105) menjelaskan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, perlu merepresentasikan:

- A. Keahlian dasar dan kompetensi kewarganegaraan selaku orientasi penting.
- B. Mempunyai ruang lingkup tentang bahan Pendidikan Kewarganegaraan komprehensif, sehingga menjadi esensi juga struktur kurikulum dan materi pembelajaran.
- C. Indikator ketercapaian pembelajaran selaku kriteria kesuksesan bersifat minimal.
- D. Pedoman mengenai pembelajaran sebagai referensi basis bagi pendidik.

Tentu upaya mengembangkan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang berdasar optimalisasi kompetensi kewarganegaraan juga pelayanan optimal terhadap mahasiswa perlu dilakukan, kendati masih bersifat kajian akademik, serta belum diuji coba. Tetapi minimal menjadi upaya dalam melakukan pembaharuan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada kebijakan kampus merdeka, sehingga adaptif terhadap berbagai problematik bangsa yang semakin kompleks juga dinamis. Terlebih hasil atas pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan melalui riset ini tidak bersifat memaksa, tetapi menjadi indikator atau acuan minimal yang bersifat nasional dalam upaya menyusun serta mengembangkan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap perguruan tinggi Indonesia. Pada upaya ilmiah mengembangkan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam kampus merdeka, peneliti akan merealisasikan model dari Tyler (dalam Fajri, 2019: 43) yang mamaparkan bahwa tahapan pengembangan kurikulum, adalah: 1) orientasi mengenai pengembangan kurikulum 2) memilih kegiatan yang mendukung tercapainya orientasi, 3) pengorganisasian pengalaman belajar, serta 4) evaluasi implementasi kurikulum.

Realisasi model Tyler pada pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada kebijakan kampus merdeka berdasar optimalisasi kompetensi kewarganegaraan bahkan pelayanan berkualitas untuk mahasiswa, karena model tersebut berfokus pada tujuan (nasional, institusional, kurikuler serta instruksional). Tujuan optimalisasi kompetensi kewarganegaraan dan disertai oleh pelayanan optimal kepada mahasiswa, atas pengembangan kurikulum PKn, karena rasionalisasi bahwa upaya mengoptimalkan kompetensi kewarganegaraan adalah modal akademik serta sosial untuk mewujudkan warga negara beradab (*civic virtue*). Raharja, dkk (2017: 201) menjelaskan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang diutamakan oleh lembaga Center for Civic Education pada tahun 1999, melalui *National Standard for Civics and Government*, tentu berfokus pada upaya mengoptimalkan kompetensi kewarganegaraan, pada tataran: *civic knowledge*, *civic skills* serta *civic disposition*. Realitas kebijakan kampus merdeka yang begitu dipengaruhi aliran filsafat pendidikan progresivisme, tentu berdampak terhadap orientasi, substansi serta struktur tentang kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang telah dikembangkan, dengan mengakomodir substansi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat modern, berkualitas, partisipatif, demokratis, berfokus terhadap mahasiswa, juga mengakomodir pembelajaran PKn secara teoretis (di dalam kelas), serta praktis (langsung pada masyarakat).

Metode

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, karena bersifat mandalam, kritis dan elaboratif, sehingga mendukung upaya pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam kampus merdeka yang berdasar optimalisasi kompetensi kewarganegaraan mahasiswa juga pelayanan berkualitas bagi mahasiswa, yang perlu dianalisis dan direfleksikan oleh peneliti, agar kurikulum tersebut memiliki karakteristik yang progresif dan merdeka. Terlebih orientasi berupa penguatan kompetensi kewarganegaraan (*civic knowledge*, *civic disposition*, serta *civic skills*) selaku modal membentuk mahasiswa yang beradab (*civic virtue*), dan tujuan pelayanan berkualitas bagi mahasiswa (responsif, komitmen, konsisten, serta merepresentasikan sistem among ajaran Ki Hajar Dewantara), yang konsep pengembangannya berbasis model dari Tyler, tentu semakin berdampak terhadap relevannya pendekatan kualitatif untuk dioptimalkan pada penelitian ini. Sumber penelitian ini difokuskan pada jurnal sebagai sumber primer, karena memiliki keabsahan bersifat tinggi, yang didukung melalui sumber sekunder, seperti dokumen kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan nasional serta landasan hukum terkait, agar meminimalisir terjadinya kesalahan penelitian yang bersifat konsep juga praksis. Analisis data mengoptimalkan teknik dari Miles dan Huberman (1992: 16) yang memaparkan teknik analisis data kualitatif adalah: reduksi data, display data, verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1) Optimalisasi Kompetensi Kewarganegaraan Dan Pelayanan Berkualitas Untuk Mahasiswa Melalui Kampus Merdeka.

Pada substansinya kebijakan kampus merdeka begitu dipengaruhi oleh aliran filsafat pendidikan progresivisme yang berfokus untuk mewujudkan kemerdekaan, modernisasi serta demokratisasi dalam bidang pendidikan. Nanggala dan Suryadi (2021: 24) memaparkan bahwa kampus merdeka begitu merepresentasikan aliran filsafat pendidikan progresivisme, karena

menghendaki kemerdekaan dan modernisasi pada bidang pendidikan, tentu praktis mengenai pembelajarannya perlu bersifat eksploratif, partisipatif, kritis, komprehensif dan berfokus pada mahasiswa. Sehingga struktur kurikulum pada aliran filsafat pendidikan progresivisme perlu mencerminkan konsep pendidikan yang modern, berkualitas, merdeka serta berfokus terhadap mahasiswa, guna memiliki relevansi terhadap perspektif progresivisme. Dalam konteks upaya mengembangkan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka, tentu pada tataran orientasinya perlu mengarah terhadap optimalisasi kompetensi kewarganegaraan dan upaya memberi pelayanan berkualitas untuk mahasiswa, karena secara umum mencerminkan aliran filsafat pendidikan progresivisme.

Optimalisasi kompetensi kewarganegaraan terhadap mahasiswa selaku generasi muda, merupakan kebutuhan dasar dalam mewujudkan kehidupan nasional yang berdasar Pancasila serta UUD 1945, karena kompetensi kewarganegaraan tersebut menjadi indikator dasar dalam mewujudkan warga negara beradab (*civic virtue*). Branson (dalam Lonto, 2019: 39) melakukan kategorisasi pada kompetensi kewarganegaraan menjadi: 1) *civic knowledge* (pengetahuan juga wawasan warga negara), 2) *civic skill* (keterampilan warga negara), bahkan 3) *civic disposition* (watak atau kepribadian warga negara). Sehingga kompetensi kewarganegaraan tersebut, perlu ditransformasikan pada mahasiswa selaku generasi muda, guna menjadi langkah konkret dalam mewujudkan warga negara beradab, yang secara sadar serta sukarela untuk melakukan tugas atau tanggung jawabnya dalam merealisasikan keadilan sosial. Strategi transformasi tersebut akan efektif apabila melalui pendidikan dan didukung melalui pengembangan kurikulum PKn yang berdasar pada optimalisasi kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan berkualitas untuk mahasiswa, agar terjadinya harmonisasi dalam implementasinya.

Pada tataran *civic knowledge*, tentu lebih berfokus pada pengetahuan juga wawasan warga, guna menjadi modal akademik warga negara untuk mengatasi masalah pribadi serta masalah sosial, karena tanpa dibekali pengetahuan, tujuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan pernah terwujud. Sehingga orientasi atas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka, perlu mencerminkan upaya mengoptimalkan *civic knowledge* mahasiswa, dengan transformasi teori, konsep, temuan juga pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan. Rohani dan Samsiar (2017: 51) memaparkan Pendidikan Kewarganegaraan harus mentransformasikan pengetahuan juga wawasan tentang Keilmuan PKn pada mahasiswa, informasi argumentatif mengenai pentingnya merealisasikan hak dan kewajiban warga negara, tentu agar tujuan pembelajaran PKn bisa tercapai, perlu didukung oleh kurikulum, strategi juga model pembelajaran berkualitas. Faktanya dengan kapasitas *civic knowledge* yang mumpuni, tentu cita-cita nasional, pada upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani (masyarakat demokrasi Indonesia), secara efektif mampu tercapai.

Pada tataran *civic skills*, tentu lebih berfokus terhadap keterampilan atau keahlian yang perlu dimiliki oleh warga negara, sebagai modal sosial untuk bertahan bahkan menang dalam kompetisi pada era modern yang semakin sengit, juga hambatan dan tantangan yang semakin dinamis juga kompleks. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai keilmuan yang bersifat utuh, tentu tidak sebatas optimalisasi pengetahuan dan sikap warga negara saja, tetapi juga berupaya untuk mengoptimalkan keterampilannya, terlebih pada era modern saat ini, warga negara harus dibekali *hardskill* dan *softskill* yang komprehensif. *Civic skills* (keterampilan atau keahlian) warga negara, berfokus pada keterampilan yaitu kreatifitas, inovasi, kepemimpinan, kreatifitas,

berpikir kritis, kolaborasi, adaptasi, komunikasi, pengambilan keputusan, bahkan membaca kondisi, karena pada realitas modernisasi, warga negara perlu dibekali keterampilan yang komprehensif serta mumpuni (Dias dan Soares: 2018: 5). Tentu struktur keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengarah terhadap upaya dalam mengoptimalkan keterampilan milik mahasiswa sebagai warga negara yang diakomodir melalui substansi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, agar Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian, inovatif serta berdaya saing.

Pada tataran *civic disposition*, nyatanya lebih berfokus pada watak atau karakter yang bersifat positif, sebagai modal akademik dan sosial dalam mewujudkan kehidupan sosial yang damai, aman, makmur dan adil. Sehingga *civic disposition* merupakan representasi penting atas konsep warga negara yang beradab, karena direalisasikan melalui karakter atau watak warga negara, tentu realitas modernisasi tidak bisa merubah orientasi dasar PKn dalam membentuk warga negara agar memiliki karakter yang mencerminkan Pancasila dan UUD 1945. Orientasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter warga negara yang pancasilais tidak akan pernah berubah, karena modernisasi, tetapi konsep strategi juga model pembelajarannya, bisa adaptif terhadap modernisasi (Fusnika, 2014: 57). Sehingga optimalisasi *civic disposition* mahasiswa selaku warga negara, melalui Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan langkah konkret dalam membuat bangsa eksis dalam globalisasi, sehingga perlu dikokohkan melalui pembelajaran PKn yang kurikulum, temuan, konsep juga pendekatannya mencerminkan upaya optimalisasi kompetensi *civic disposition* mahasiswa.

Tentu optimalisasi kompetensi kewarganegaraan (*civic knowledge, civic skills* bahkan *civic disposition*), akan mengefektifkan upaya dalam mewujudkan warga negara yang beradab (*civic virtue*), karena dengan keadaban warga negara akan berkontribusi efektif pada langkah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Sehingga konsep keilmuan PKn dalam arti sempit sebagai *civic education*, serta konsep keilmuan PKn dalam arti luas sebagai *citizenship education*, perlu memandang penting upaya mengoptimalkan kompetensi kewarganegaraan, melalui tujuan dan praksis pembelajarannya, yang diringkas melalui struktur kurikulum PKn pada kampus merdeka. Karena praktis pembelajaran pada kampus merdeka bersifat di dalam kelas juga langsung dimasyarakat, sehingga selaras dengan konsep PKn dalam arti sempit dan arti luas, yang orientasinya dirangkum melalui kurikulum PKn pada kampus merdeka berdasar optimalisasi kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan berkualitas untuk mahasiswa, selaku wahana mewujudkan warga negara beradab. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki tanggung jawab berat, karena harus membentuk mahasiswa, sehingga menjadi warga negara beradab, selaras terhadap Pancasila juga UUD 1945 (Hamidah, 2019: 38).

Optimalisasi kompetensi kewarganegaraan mahasiswa melalui pembelajaran PKn pada kampus merdeka, akan efektif, apabila disertai dengan pelayanan berkualitas untuk mahasiswa, karena konsep pelayanan berkualitas adalah membimbing serta melayani sepenuh hati. Konsep tentang bimbingan dan pelayanan berkualitas berdasar kasih sayang dan saling menghormati, tentu disosialisasikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai sistem among, sehingga pelayanan optimal tidak hanya sebatas layanan administrasi dan kemahasiswaan saja, tetapi bersifat komprehensif. Pendidikan yang merdeka dalam tataran lahir juga batin, perlu diberikan kepada peserta didik atau mahasiswa, yang dioptimalkan melalui sistem among (membimbing dan melayani), sehingga mereka mampu berkembang secara optimal, karena realisasi sistem among bersifat menyenangkan serta partisipatif (Dewantara dalam Noventari, 2020: 86). Tentu pelayanan optimal pada mahasiswa dalam perspektif kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan juga mengakomodir konsep tersebut, guna mewujudkan keadaban mahasiswa sebagai warga

negara, agar meminimalisir terjadinya praksis pembelajaran PKn yang sebatas pragmatis serta prosedural.

Pelayanan pada mahasiswa perlu diberikan, karena mereka merupakan bagian integral dari warga negara, sehingga agar memiliki bekal mumpuni saat kembali pada masyarakat, guna menyelesaikan tanggung jawabnya, tentu pelayanan berkualitas menjadi upaya konkret dalam mempersiapkan mahasiswa, agar kompetensi kewarganegaraannya terasah secara utuh. Tentu pelayanan mahasiswa juga mengakomodir konsep pelayanan perguruan tinggi yang bersifat non akademik, karena perguruan tinggi merupakan institusi formal dan profesional, tentu perlu selaras dengan kualitas pelayanan non akademik bagi mahasiswa, agar terwujudnya kepuasan mahasiswa saat melakukan bahkan menyelesaikan studinya. Tentu kepuasan mahasiswa pada umumnya, dicerminkan melalui: 1) kapasitas pendidikan, 2) resonansi biaya terhadap fasilitas lembaga, 3) kualitas dosen, 4) administrasi cakap, 5) akses yang mudah, serta 6) pembelajaran yang menyenangkan (Rahmawati, 2013: 52). Sehingga substansi pelayanan berkualitas untuk mahasiswa diakomodir dalam pengembangan kurikulum PKn pada kampus mereka, sebagai indikator atau acuan dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa yang berkualitas, baik pada tataran akademik maupun non akademik, agar mahasiswa mampu dibentuk kompetensi kewarganegaraannya, secara komprehensif.

Tentu informasi argumentatif tersebut menegaskan mengenai pentingnya orientasi pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam kampus merdeka berdasar pada optimalisasi kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan berkuakitas untuk mahasiswa. Karena hambatan dan tantangan pada era modern yang semakin dinamis bahkan kompleks, sehingga keilmuan PKn perlu mengatasi fenomena tersebut, agar Indonesia tidak mengalami probematik mengenai kualitas penduduk mudanya. Terlebih kebijakan kampus merdeka mengakomodir konsep dan praktis pendidikan tinggi yang merdeka bahkan modern melalui pembelajarannya yang beragam, sehingga kolaborasi keilmuan PKn dan kebijakan kampus merdeka, merupakan langkah strategis dalam mengelola bonus demografi. Realisasi mengenai kolaborasi tersebut, tentu mampu diejawantahkan melalui pengembangan kurikulum PKn pada kampus merdeka berdasarkan optimalisasi kompetensi kewarganegaraan bahkan pelayanan berkualitas untuk mahasiswa, sebagai upaya akademik dalam mewujudkan mahasiswa selaku warga negara muda yang beradab (*civic virtue*), dengan keadaban warga negara, tentu orientasi integrasi sosial dan kesejahteraan umum, akan terwujud secara efektif dan menyeluruh.

2) Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Pada Kampus Merdeka Berdasar Optimalisasi Kompetensi Kewarganegaraan Dan Pelayanan Optimal Terhadap Mahasiswa.

Pada pembahasan ini, akan dijelaskan mengenai pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka berdasar optimalisasi kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan berkualitas terhadap mahasiswa, secara ringkas bahkan utuh. Pengembangan kurikulum PKn pada kampus merdeka, minimal perlu mencerminkan aliran filsafat pendidikan progresivisme, dan kolaborasi dengan aliran filsafat pendidikan lainnya, mencerminkan tujuan kurikulum PKn pada kampus merdeka berdasar optimalisasi kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan berkualitas untuk mahasiswa, yang model pengembangan kurikulumnya, tentu mengoptimalkan model dari Tyler. Secara substansi pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka, dalam tataran ruang lingkup materi, tidak memiliki perbedaan signifikan dengan ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, yang disosialisasikan oleh Dirjen Dikti (2014), seperti materi: hakikat PKn, identitas Indonesia, integrasi bangsa, nilai bahkan norma, hak juga kewajiban warga negara, demokrasi

yang berdasar Pancasila, hukum juga konstitusi, politik bahkan hak azasi manusia, wawasan nusantara, bahkan pertahanan nasional. Perbedaan dan pembaharuan kurikulumnya, mengarah pada pembelajaran yang merdeka dan berfokus pada mahasiswa (*student centered learning*), pembelajaran komprehensif (di dalam kelas dan langsung dimasyarakat), menekankan tentang pentingnya pengembangan minat serta bakat mahasiswa, berikut akan dijelaskan secara ringkas dan argumentatif tentang realisasi, substansi serta praktis mengenai pengembangan kurikulum PKn pada kampus merdeka, berdasar pada model Tyler:

a) Orientasi Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka berfokus pada upaya ilmiah dalam mengoptimalkan kompetensi kewarganegaraan juga memberikan pelayanan berkualitas untuk mahasiswa. Terlebih optimalisasi kompetensi kewarganegaraan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan warga negara yang beradab (*civic virtue*). Sehingga orientasi yang bersifat turunan dari konsep optimalisasi kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, mampu dikembangkan oleh setiap lembaga atau perguruan tinggi, karena diberikan otonomi untuk merealisasikan konsep tersebut. Tentu selain pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan berdasar pada optimalisasi kompetensi kewarganegaraan, juga berbasis pelayanan berkualitas bagi mahasiswa, agar terjadinya pendidikan serta pembelajaran yang membimbing bahkan melayani dengan disertai kasih sayang juga saling menghormati, tentu tidak terbatas pada pelayanan dan bimbingan pendidikan juga pembelajaran yang berkualitas, tetapi juga pelayanan administrasi dan kemahasiswaan yang komprehensif serta berdampak positif bagi perkembangan mahasiswa.

Pada konteks orientasi pada konsep dan praktis pembelajaran, mengarah pada upaya ilmiah untuk memberikan pembelajaran yang merdeka, partisipatif, demokratis, modern, berkualitas, memberikan ruang pembelajaran langsung dimasyarakat (*service learning*). Sebagai upaya memberikan pembelajaran yang bermakna juga berdampak positif terhadap mahasiswa, karena paradigma pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam kampus merdeka, pada konteks pembelajarannya, mengarah terhadap upaya memberikan pembelajaran yang bersifat substantif dan komprehensif tidak prosedural dan pragmatis. Karena sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan perlu memiliki peran nyata pada upaya mengelola bonus demografi, guna berimplikasi pada meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang berkepribadian, berdaya saing serta unggul dan meningkatkan inovasi nasional, tentu upaya bisa meminimalisir terjadinya pengangguran serta kemiskinan. Sujana (2015: 1) menjelaskan tantangan globalisasi dan persaingan internasional yang semakin sengit, berdampak pada kajian keilmuan PKn sebagai bentuk pembelajaran wajib perlu terus adaptif dan komprehensif, dengan tetap berdasar pada Pancasila serta UUD 1945.

b) Prinsip dan Praktis Pembelajaran PKn yang Mampu Mendukung Tercapainya Orientasi Pengembangan Kurikulum

Penting dalam memberikan praktis pembelajaran PKn yang relevan terhadap kurikulum PKn yang dikembangkan pada kampus merdeka yang berdasar optimalisasi kompetensi kewarganegaraan bahkan pelayanan berkualitas untuk mahasiswa, terlebih praktis pembelajaran pada kampus merdeka begitu beragam. Diungkapkan oleh Buku

Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020), bahwa praktis pembelajaran pada kampus merdeka adalah: pertukaran pelajar, praktik kerja, asistensi mengajar, riset, proyek kemanusiaan, proyek independen, wirausaha, KKN tematik atau membangun desa. Tentu praktis pembelajaran PKn bisa berkolaborasi dengan praktis pembelajaran pada kampus merdeka, karena pada substansinya praktis pembelajaram PKn yang bisa atau efektif dalam mencapai orientasi pengembangan kurikulum PKn pada kebijakan kampus merdeka, bersifat konsep pembelajaran umum yang mengarah terhadap prinsip pembelajaran yang diejawantahkan pada orientasi pengembangan kurikulum di atas (merdeka, demokratis, partisipatif, berfokus pada mahasiswa, mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, berpikir kritis, mengakomodir pembelajaran bersifat langsung dimasyarakat atau *service learning* serta *community service*). Karena setiap perguruan tinggi mempunyai orientasi akademiknya tersendiri, serta memiliki lingkungan sosial yang berbeda, tentu guna memperkuat kehidupan civitas akademika yang demokratis dan berdampak pada penguatan kehidupan masyarakat yang multikultur berbasis pada kearifan lokal, tentu pembelajaran PKn yang direkomendasikan oleh peneliti, mampu untuk dikembangkan, sehingga peneliti hanya berorientasi untuk memberikan konsep bahkan praktis pembelajaran yang mengarah pada orientasi pengembangan kurikulum PKn pada kampus merdeka, yaitu:

➤ Ruang Lingkup Mengenai Materi Pembelajaran PKn

Ruang lingkup mengenai materi pembelajaran PKn yang dioptimalkan sebagai materi bersifat minimal, yang perlu diakomodir oleh kurikulum PKn pada kampus merdeka yang telah dikembangkan, tentu tidak memiliki perbedaan yang bersifat mendasar. Karena peneliti merujuk pada ruang lingkup pembelajaran PKn pada perguruan tinggi, yang dikampanyekan oleh Dirjen Dikti (2014), berfokus terhadap: hakikat PKn, identitas Indonesia, integrasi bangsa, nilai, karakter, norma, hak juga kewajiban warga negara, demokrasi berdasar Pancasila, hukum serta konstitusi, politik dan hak azasi manusia, wawasan nusantara dan pertahanan nasional. Karena materi PKn tersebut menjadi syarat normatif, dalam mengoptimalkan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, dengan didukung oleh realisasi pembelajaran yang bersifat substantif bahkan komprehensif melalui elaborasi materi pada implementasi pembelajaran di kelas, terlebih peneliti juga merekomendasikan ruang lingkup pada pembelajaran PKn, selain yang telah diejawantahkan di atas yaitu multikultural, kebijakan publik, *digital citizenship*, lingkungan hidup dan *service learning*. Tentu mengenai elaborasi materi baik bersifat pengembangan atau integrasi, merupakan otonomi dari pembelajaran PKn di setiap perguruan tinggi, yang penting ruang lingkup tersebut merupakan indikator dasar, sehingga terjadinya harmonisasi yang bersifat nasional pada orientasi, konsep dan praksis pembelajaran PKn pada kampus merdeka.

➤ Pembelajaran Berfokus Pada Mahasiswa

Pembelajaran pada era modern tentu berfokus pada mahasiswa, sebagai langkah meminimalisir terjadinya realisasi pembelajaran yang sebatas prosedural, karena hanya menjadikan mahasiswa sebagai objek pembelajaran saja. Sehingga tidak berdampak nyata terhadap kemajuan mahasiswa, tentu pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa, mengakomodir pengembangan minat bahkan bakat mereka, guna

menjadi modal ilmiah dan sosial untuk berkarier dan berperan dimasyarakat. Pada substansinya pembelajaran berfokus pada mahasiswa, mengakibatkan peran guru atau dosen lebih sebagai pembimbing, mediator juga fasilitator, yang berkompeten untuk memaksimalkan kemajuan mahasiswa, sehingga realisasi atas sistem among mampu tercapai. Oinstain dan Levine (dalam Faris, 2015: 322) mengungkapkan kurikulum modern dan berkualitas perlu mendukung realisasi pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa, mengakomodir konsep serta praktis pembelajaran yang partisipatif, kreatif, demokratis, menggembirakan dan memberikan pembelajaran langsung di lingkungan sosial.

➤ Kelas Sebagai Laboratorium Demokrasi

Penting dalam mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi mahasiswa, karena pembelajaran PKn perlu merepresentasikan konsep keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang mengarah pada upaya mewujudkan masyarakat demokratis. Sehingga realisasi pembelajaran PKn di kelas selain berupaya mentransformasikan pengetahuan dan wawasan yang bersifat teoretis, juga berupaya untuk membentuk sikap dan karakter mahasiswa yang demokratis, partisipatif, kritis, toleran, disiplin dan sikap positif yang lainnya. Tentu orientasi tersebut yang diintegrasikan melalui pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka berdasar optimalisasi kompetensi kewarganegaraan bahkan pelayanan berkualitas untuk mahasiswa, bisa terwujud apabila realisasi pembelajarannya megakomodir nilai-nilai demokrasi Pancasila, agar pembelajaran PKn tidak sebatas prosedural dan pragmatis saja, tetapi berdampak positif pada upaya ilmiah dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara beradab. Nanggala (2020: 78) mengungkapkan dalam merealisasikan kehidupan bangsa yang demokratis, tentu pembelajaran PKn di perguruan tinggi, perlu mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan UUD 1945, salah satunya melalui optimalisasi kelas sebagai laboratorium demokrasi bagi mahasiswa.

➤ Optimalisasi Pembelajaran PKn dimasyarakat

Tentu paradigma baru pembelajaran PKn di perguruan tinggi, adalah memberi ruang bagi mahasiswa untuk menelaah dan merefleksikan ketimpangan mengenai cita-cita yang bersifat teoretis terhadap realitas masyarakat yang bersifat praksis. Sehingga mahasiswa mengetahui tentang realitas pembelajaran PKn dimasyarakat, serta memiliki motivasi untuk mengatasi problematik tersebut, sebagai tindak lanjut atas sikap dan keahlian, yaitu peka sosial, kreatifitas, inovasi, komitmen, konsisten bahkan partisipasi. Karena pembelajaran PKn yang bersifat langsung dimasyarakat, kurang begitu diutamakan dan diminati, dengan dalih tidak efisien, tetapi realisasi pembelajaran PKn dimasyarakat yang berdasar *service learning* atau *community service*, memiliki beragam manfaat positif, selain mampu memperkuat keahlian atau keterampilan *softskills* dan *hardskills* milik mahasiswa, seperti komunikasi, kepemimpinan, beradaptasi, kreatif, mandiri, kolaborasi, juga mampu melatih sikap kesadaran, kesukarelaan dan kepekaan sosial mahasiswa, sehingga bisa melakukan keterlibatannya dimasyarakat. Jerome (2012: 67) menjelaskan pembelajaran PKn melalui *service learning*, merupakan langkah strategis dalam membentuk peserta didik, agar menjunjung nilai kemanusiaan, peka sosial, demokratis, adaptif, kreatif,

karena bisa melaksanakan tanggung jawabnya melalui keterlibatan publik, sehingga menjadi wahana dalam melatih warga negara yang mampu diandalkan.

c) Pengorganisasian Pengalaman Belajar

Secara ringkas pengalaman belajar pada pengembangan kurikulum berdasar model Tyler, mengarah pada upaya memberikan pemahaman bersifat komprehensif, terhadap mahasiswa, agar mahasiswa berkompeten membangun pengetahuan melalui pengalamannya. Sehingga pengorganisasian pengalaman begitu penting, agar realisasi kurikulum berdampak positif terhadap optimalisasi kompetensi kewarganegaraan milik mahasiswa, baik pada tataran *civic knowledge*, *civic skills*, maupun, *civic knowledge* mahasiswa, tentu pada bagian ini akan dijelaskan secara ringkas bahkan argumentatif mengenai pengorganisasian pengalaman belajar mahasiswa terhadap pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka, berdasar optimalisasi kompetensi kewarganegaraan juga pelayanan berkualitas bagi mahasiswa, yang praktis pengorganisasian pengalaman belajarnya didasarkan terhadap kategorisasi dari konsep Tyler. Pengorganisasian kurikulum berdasar pengalaman belajar perlu dilaksanakan, sehingga pembelajaran bersifat efektif dalam mencapai orientasi yang telah ditetapkan, tentu pengorganisasian tersebut mengarah pada: kontinuitas, urutan isi serta integrasi (Tyler dalam Fitriah, 2018: 54). Sehingga pada pengembangan kurikulum PKn dalam kampus merdeka berdasar optimalisasi kompetensi kewarganegaraan bahkan pelayanan berkualitas untuk mahasiswa, pada konteks pengorganisasiannya, berfokus terhadap:

➤ Kontinuitas

Substansi kurikulum yang komprehensif adalah bersifat kontinuitas, sehingga mengakomodir materi pembelajaran yang berkesinambungan, saling beresonansi, sehingga membentuk pengalaman belajar mahasiswa. Pada konteks pembelajaran PKn sebagai pembelajaran wajib, tentu harus mengakomodir prinsip kontinuitas pada pengembangan kurikulumnya, yang diejawantahkan melalui materi PKn dari hakikat PKn sampai pada kajian eksplisit seperti politik, hukum, demokrasi, HAM dan yang diinformasikan melalui ruang lingkup materi PKn yang dikembangkan pada kurikulum PKn di dalam kampus merdeka. Karena orientasinya berfokus pada upaya mengoptimalkan kompetensi kewarganegaraan serta pelayanan berkualitas bagi mahasiswa, tentu kontinuitas tentang pembelajarannya tidak selalu difokuskan pada optimalisasi pengetahuan dan wawasan saja, tetapi juga pembentukan sikap dan karakter melalui habituasi perilaku terpuji dan pelatihan keahlian mahasiswa sebagai warga negara muda, karena kelas yang demokratis mengakomodir tujuan tersebut. Prinsip kontinuitas juga bisa direalisasikan dengan menganalisis realitas serta problematik masyarakat melalui teori, temuan dan konsep PKn di dalam kelas, guna mewujudkan pembelajaran yang komprehensif, dan melatih kepribadian serta keterlibatan mahasiswa (Zakaria, dkk: 2020: 56).

➤ Urutan Isi

Pada orientasi mahasiswa mampu memahami materi pembelajaran PKn, tentu akan bersifat efektif, apabila terdapat pola transformasi materi dalam pembelajaran PKn secara umum ke khusus, karena mudah untuk dipahami mahasiswa. Terlebih kajian PKn di perguruan tinggi, begitu komprehensif, sehingga apabila diajarkan secara keseluruhan bagi program studi yang bukan merupakan program studi PKn,

tentu akan diklaim, sebagai tugas yang berat, sehingga persepsi pembelajaran PKn yang menjenuhkan, berpotensi besar untuk terulang kembali. Karena orientasi atas pengembangan kurikulum PKn dalam kampus merdeka, bedasar optimalisasi pada kompetensi kewarganegaraan serta pelayanan berkualitas untuk mahasiswa, tentu mengakomodir pembelajaran PKn yang menyenangkan bahkan berdampak positif terhadap kemajuan mahasiswa, sehingga berprinsip pembelajaran yang substantif serta komprehensif, sehingga materi pembelajarannya bisa diintegrasikan bahkan dikembangkan sesuai orientasi keilmuan dan kehidupan sosio-kultural pada setiap perguruan tinggi, tetapi yang ditekankan adalah urutannya harus bersifat harmonis, dan membentuk pengalaman belajar mahasiswa. Pembelajaran PKn di perguruan tinggi harus bermakna dan memperkuat kepribadian dan keahlian milik mahasiswa, sehingga realisasi pembelajarannya perlu eksploratif, agar tidak bersifat seremonial, karena pembelajaran PKn yang eksploratif juga komprehensif bisa meningkatkan minat mahasiswa untuk mendalami keilmuan PKn (Paturahman: 2017: 255).

➤ Integrasi

Modernisasi dan kompleksnya problematik masyarakat, mengakibatkan kajian PKn perlu terus adaptif dengan berkolaborasi dengan keilmuan lain, sebagai upaya ilmiah dalam mengembangkan keilmuannya. Sehingga timbullah konsep keilmuan PKn yang interdisipliner, multidisipliner juga transdisipliner, tentu realitas tersebut merupakan wahana dalam meningkatkan khazanah keilmuan nasional juga menjadi rujukan ilmiah dalam mengatasi probematik masyarakat secara jitu. Tentu konsep tersebut juga direalisasikan pada pengembangan kurikulum PKn di dalam kampus merdeka bedasar optimalisasi kompetensi kewarganegaraan serta pelayanan yang berkualitas untuk mahasiswa, terlebih praktis pembelajaran pada kampus merdeka begitu beragam, tentu pembelajaran PKn juga perlu adaptif, karena keilmuannya bersifat luas (*citizenship education*), tentu tidak sebatas di dalam kelas saja (*civic education*), praktisnya pembelajaran PKn bisa berkolaborasi dengan disiplin ilmu hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, hubungan internasional, bahkan pariwisata, sehingga terjadinya integrasi keilmuan, yang berdampak pada komprehensifnya *body of knowledge* PKn. Pendidikan Kewarganegaraan mampu berkolaborasi dengan rumpun ilmu sosial, sehingga mampu beradaptasi bahkan berkembang pada era modern, agar menjadi keilmuan yang bersifat interdisipliner, multidisipliner serta transdisipliner (Kariadi, 2016: 18)

d) Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum merupakan langkah penting dalam upaya menyempurnakan kurikulum, karena melalui evaluasi kurikulum akan diketahui mengenai kelebihan serta kekurangan pada kurikulum terkait. Faktanya pada konteks pengembangan kurikulum dalam kampus merdeka berdasarkan optimalisasi kompetensi kewarganegaraan serta pelayanan berkualitas terhadap mahasiswa, tentu evaluasi kurikulumnya dikembalikan pada setiap perguruan tinggi, karena merekalah yang secara aktual mengetahui realitas lapangan, sehingga bisa menilai secara objektif mengenai kelebihan serta kekurangan pada kurikulum tersebut, agar realisasi pada waktu selanjutnya, lebih baik lagi. Tentu hasil evaluasi penerapan kurikulum PKn pada kampus merdeka, yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi tersebut, mampu menjadi catatan penting bagi Kemendikbud

serta peneliti selanjutnya, agar konseptualisasi bahkan realisasi kurikulum PKn dalam kampus merdeka berdasar optimalisasi kompetensi kewarganegaraan serta pelayanan berkualitas untuk mahasiswa, mampu berdampak nyata dalam mewujudkan mahasiswa sebagai warga negara yang beradab, berbasis pada Pancasila serta UUD 1945. Adnan (2017: 108) mengungkapkan evaluasi kurikulum dilakukan untuk menelaah realisasi kurikulum, apakah bersifat efektif dalam membantu pendidik untuk mencapai indikator pembelajaran yang telah ditetapkan, hasil evaluasi kurikulum, mampu menjadi acuan untuk melanjutkan realisasi kurikulum merevisinya bahkan menggantinya.

B) Realisasi Pelayanan Berkualitas Kepada Mahasiswa

Penguatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, sebagai orientasi pengembangan kurikulum PKn dalam kampus merdeka, tentu lebih efisien, apabila eksisnya pelayanan optimal untuk mahasiswa, terlebih konsep pelayanan adalah membimbing juga melayani sepenuh hati. Intisari bimbingan dan pelayanan berkualitas berdasar kasih sayang dan saling menghormati, nyatanya telah disosialisasikan Ki Hajar Dewantara, berbentuk sistem among, yang berdampak pada pelayanan berkualitas tidak sebatas layanan administrasi juga kemahasiswaan saja, tetapi bersifat holistik. Konsep Pendidikan merdeka secara lahir juga batin, perlu diberikan kepada mahasiswa, berbasis sistem among (membimbing dan melayani), supaya mahasiswa mampu berkembang secara optimal, terlebih sistem among menekankan pembelajaran yang bersifat menyenangkan dan partisipatif (Dewantara dalam Noventari, 2020: 86). Sehingga substansi pelayanan berkualitas bagi mahasiswa, diakomodir melalui pengembangan kurikulum PKn, supaya menjadi wahana merealisasikan keadaban mahasiswa, sebagai warga negara muda, agar meminimalisir praksis pembelajaran PKn di perguruan tinggi yang bersifat pragmatis juga prosedural, maka substansi atas pelayanan berkualitas dalam kampus merdeka, adalah:

a. Pelayanan Berkualitas Dalam Pembelajaran

Pelayanan optimal pada pembelajaran, mengakomodir upaya mengatasi praksis pembelajaran PKn, yang bersifat tekstual, monoton, serta seremonial serta pragmatis. Dengan rasionalisasi pelayanan berkualitas pada pembelajaran merupakan penerapan sistem among Ki Hajar Dewantara, yang menekankan urgensi bimbingan dan pelayanan berbasis kasih sayang dari dosen pada mahasiswa, supaya minat dan bakat mahasiswa mampu diasah secara optimal, terlebih pada konsep pendidikan merdeka, peran dosen lebih menjadi mediator pembimbing, dan fasilitator. Substansi pelayanan berkualitas pada pembelajaran, nyatanya mentransformasi paradigma pembelajaran di kelas, yang sebatas transaksi pengetahuan menjadi wahana penguatan karakter dan keterampilan yang holistik, berbasis kasih sayang, saling menghormati, menghargai juga kegiatan pembelajaran yang demokratis, kritis, partisipatif dan modern, supaya perkembangan mahasiswa mampu ditelaah secara objektif. Ruslan (2018: 211) menjelaskan bahwa pembelajaran pada era modern, tidak hanya transaksi pengetahuan, tetapi bersifat utuh melalui pembentukan karakter dan keahlian mahasiswa, maka konsep pembelajaran yang merdeka perlu direalisasikan, yang menjadikan dosen sebagai pembimbing dan mahasiswa sebagai penggerak dalam pembelajaran.

b. Pelayanan Optimal Dalam Kemahasiswaan

Disiplin ilmu PKn perlu memandang penting eksistensi program juga pelayanan kemahasiswaan, menjadi wahana alternatif penguatan kompetensi kewarganegaraan milik mahasiswa, tentu melalui ormawa mahasiswa mampu merealisasikan aktivitas politik dan demokrasi, sebagai praktis *good and smart citizen*. Maka praksis pelayanan berkualitas pada kemahasiswaan, berfokus pada langkah nyata dosen untuk memberi usul, dukungan dan saran tentang aktivitas kemahasiswaan, agar bermanfaat holistik baik pada mahasiswa, institusi, juga masyarakat, terlebih kurikulum PKn pada kampus merdeka, dikembangkan, supaya merealisasikan harmonisasi, antara kampus merdeka

dengan pembelajaran PKn, agar efektif mengelola bonus demografi. Dalam konsep pelayanan kemahasiswaan, juga mengakomodir pelayanan administrasi yang modern, dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi secara arif juga bijaksana karena kebijakan kampus merdeka memandang penting Revolusi Industri 4.0. Rizvi (2011) menjelaskan modernisasi pendidikan tinggi, mengakomodir pelayanan berkualitas untuk mahasiswa, supaya mereka berkembang secara optimal dan bisa berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Kesimpulan

Pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam kampus merdeka yang berdasarkan optimalisasi kompetensi kewarganegaraan serta pelayanan berkualitas terhadap mahasiswa, merupakan upaya akademik dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara beradab (*civic virtue*), sehingga terjadinya kolaborasi kebijakan kampus merdeka dan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengelola bonus demografi. Tentu pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam kampus merdeka berdasarkan optimalisasi kompetensi kewarganegaraan serta pelayanan berkualitas terhadap mahasiswa mengakomodir upaya peningkatan *civic knowledge*, *civic skills* serta *civis disposition* mahasiswa. Pada tataran pelayanan berkualitasnya, tentu mengarah pada praktis pembelajaran yang merepresentasikan sistem among Ki Hajar Dewantara yang mengarah pada terjadinya bimbingan dan pelayanan pada praktis pembelajaran, agar mahasiswa berkembang secara optimal, yang didukung oleh pelayanan administrasi dan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, sehingga mahasiswa mampu menjadi warga negara yang bisa diandalkan. Faktanya pengembangan kurikulum PKn dalam kampus merdeka berdasar optimalisasi kompetensi kewarganegaraan bahkan pelayanan yang berkualitas terhadap mahasiswa, berbasis pada model Tyler, karena berfokus pada tujuan kurikulum serta pengembangannya bisa dilakukan pada tingkat nasional, institusi serta praktis pembelajaran, pada konteks evaluasinya, tentu dilakukan oleh setiap institusi, karena menjadi realisasi atas otonomi kampus merdeka, sehingga menjadi rujukan untuk pemerintah bahkan peneliti selanjutnya, agar realisasi kurikulum PKn dalam kampus merdeka yang berdasarkan optimalisasi kompetensi kewarganegaraan serta pelayanan optimal untuk mahasiswa mampu berdampak positif bagi terwujudnya masyarakat madani Indonesia.

Referensi

- Adhan, (2017). Evaluasi Kurikulum sebagai Kerangka Acuan Pengembangan Pendidikan Islam. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Menejemen Pendidikan Islam*, 1(2), 108-129.
- Asri, M. (2017). Dinamika Kurikulum di Indonesia. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2), 193-202.
- Dias, D., & Soares, D. (2017). Civic Learning Outcomes: a Step Towards an Inclusive Higher Education. *International Journal of Inclusive Education*, 22(4), 360–374. doi: <https://doi.org/10.1080/13603116.2017.1365956>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2014). Pedoman Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbud.

- Fajri, K. N. (2019). Proses Pengembangan Kurikulum. *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 35-48. doi <https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.193>
- Faris, F. A. (2015). Kurikulum 2013 dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Progressivisme. *Jurnal Filsafat*, 25(2), 317-338. doi: <https://doi.org/10.22146/jf.12687>
- Fitriah. (2018). Model Pengembangan Kurikulum Ralph W. Tyler. *An-Nahdhah-Jurnal Ilmiah Keagamaan dan kemasyarakatan*, 11(1), 45-58.
- Fusnika. (2014). Pembinaan *Civic Disposition* Berdasar Nilai-Nilai Kemanusiaan pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. *JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(1), 50-57. doi: <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i1.2063>
- Hamidah. (2019). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Forum Paedagogik*, 11(1), 27-39. doi: <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v11i1.1776>
- Hidayat, T. Firdaus, E. & Somad, M. A. (2019). Model Pengembangan Kurikulum Tyler dan Implikasinya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, 5(2), 197-218. Doi <http://dx.doi.org/10.24014/potensia.v5i2.6698>
- Jerome, L. (2012). Service Learning and Active Citizenship Education in England. *ECSJ: Education, Citizenship and Social Justice*, 7(1), 59-70. doi: <https://doi.org/10.1177%2F1746197911432594>
- Juanda. & Rahayu, N. Q. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Pembelajaran Demokrasi di Sekolah: Suatu Alternatif Pembelajaran yang Demokratis. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 101-110. doi: <http://dx.doi.org/10.31571/pkn.v3i1.1102>
- Kaimuddin. (2015). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi. *Jurnal Al-Ta'dib*, 8(1), 19-38. doi <http://dx.doi.org/10.31332/atdb.v8i1.391>
- Kariadi, D. (2016). Revitalisasi Nilai-Nilai Edukatif Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Masyarakat Berwawasan Global Berjiwa Nasionalis. *Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 1(1), 14-23.
- Lonto, A. L. (2019). Students' Civic Disposition through Learning Civics and Pedagogical Competences of High School Teachers. *Universal Journal of Educational Research*. 7(12), 35-41. doi: <https://doi.org.10.13189/ujer.2019.071905>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nanggala, A. (2020). Citizenship Education as a Democracy Learning for Students in Higher Education. *IJECA: International Journal of Education & Curriculum and Application*, 3(1), 69-80.
- Nanggala, A. & Suryadi, K. (2021). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Aliran Filsafat Pendidikan Progresivisme dan Perennialisme. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 14-26. doi: <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31422>
- Noventari, W. (2020). Konsepsi Merdeka Belajar Dalam Sistem Among Menurut Pandangan Ki Hajar Dewantara. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 83-91. doi: <https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44902>
- Paturahman, M. (2017). Reaktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Suatu Tinjauan Andragogi). *Sosio e-kons*, 9(3), 250-256.
- Permendikbud. No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Raharja, R. M., Legiani, W. H., Sugiana, D. F. & Lestari, R. Y. (2017). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kompetensi Warga Negara Mahasiswa FKIP Untirta. *Untirta Civic Education Journal (UCEJ)*, 2(2), 199-213. doi: <http://dx.doi.org/10.30870/ucej.v2i2.2812>

- Rahmawati, D. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Mahasiswa. *Jurnal Economia*, 9(1), 52-65. doi: <https://doi.org/10.21831/economia.v9i1.1376>
- Rizvi, F. (2011). Theorizing Student Mobility in an Era of Globalization. *Teachers and Teaching*, 17(6), 693–701. doi: <https://doi.org/10.1080/13540602.2011.625145>
- Rohani. & Samsiar. (2017). Upaya Guru dalam Meningkatkan *Civic Knowledge* Siswa melalui Model Pembelajaran *Controversial Issues* pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Mujahidin Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 49-59. doi: <http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v7i1.3548>
- Ruslan. (2018). Perspektif Aliran Filsafat Progresivisme tentang Perkembangan Peserta Didik. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(2), 211-217. doi: <http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v2i2.372>
- Sujana, I. G. (2015). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) dalam Perspektif Reformasi. *Widyasrama*, 25(1), 1-8.
- Zakaria, F.A. Widijatmoko, E. K. Ladamay, I. & Kota, V. (2020). Keterlibatan Warga Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Program Desmigratif. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 55-60. doi: <https://doi.org/10.36412/ce.v4i1.1872>